



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 255 /KEP/TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak, perlu ditetapkan petunjuk teknis.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2023/2024 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3)
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Kuota dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 atau sumber lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SRI SUJARTI

Nomor : 255 /KEP/TAHUN 2023

Tanggal : 17 April 2023

Tentang

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2023/2024

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2023/2024**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah
13. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan untuk menerangkan bahwa siswa tercantum pada surat keterangan telah mengikuti seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, dimana surat tersebut berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah.
14. Surat Keterangan Nilai Rapor adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan untuk menerangkan rata-rata nilai rapor setiap semester yang diperoleh siswa sebagaimana tercantum pada surat keterangan tersebut pada 5 (lima) semester terakhir.
15. Sistem Online adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui dalam jaringan (daring).
16. Sistem Offline adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui luar jaringan (luring).
17. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu..
18. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disebut PPDB Sistem Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dengan Sistem Online.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

20. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah tujuan.
21. Daya tampung atau kuota PPDB adalah jumlah Peserta Didik Baru yang dapat ditampung pada satuan pendidikan.
22. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru.
23. Zonasi adalah pembagian/pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian.
24. Sistem Zonasi adalah pemberian zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan zonasi.
25. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan Kota Pontianak yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
26. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.
27. SPTJM adalah Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Orang Tua / Wali murid yang menyatakan bahwa data-data siswa yang disampaikan adalah benar. Format SPTJM terlampir.

II. PPDB SMP NEGERI

A. JADWAL PPDB SMP NEGERI

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengajuan Pendaftaran dan Upload Berkas Persyaratan PPDB	28 Juni 2023 s.d. 4 Juli 2023	Secara Online
2.	Klarifikasi dan Verifikasi Berkas Persyaratan PPDB sekaligus penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran	30 Juni 2023	Calon peserta didik baru akan mendapatkan Undangan melalui media WhatsApp khusus Jalur Afirmasi
		3 Juli 2023 s.d. 5 Juli 2023	Calon peserta didik baru akan mendapatkan Undangan melalui media WhatsApp
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	7 Juli 2023	Diumumkan melalui website resmi
4.	Daftar Ulang	10 Juli 2023 s.d. 11 Juli 2023 Pukul 08.00 s.d.12.00 WIB	
5.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	12 Juli 2023 s.d. 15 Juli 2023	
6.	Hari pertama masuk sekolah	17 Juli 2023	

B. PENDAFTARAN PPDB SMP NEGERI

1. Pendaftaran PPDB SMP Negeri dilakukan dengan mekanisme *online* maupun *offline* dalam hal verifikasi dan validasi berkas.
2. Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
3. Seleksi PPDB SMP Negeri dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. jalur prestasi
4. Kuota jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, (bagi sekolah yang terdiri dari kuota Zona A paling sedikit 45% (empat puluh lima) dari daya tampung Sekolah dan kuota Zona B paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
5. Zona pada jalur zonasi sebagaimana angka 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Zona A, meliputi seluruh wilayah administratif Kota Pontianak;
 - b. Zona B, meliputi seluruh wilayah luar Kota Pontianak yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kota Pontianak.
6. Calon peserta didik yang berasal dari zona B sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b dapat melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Pontianak Utara : SMP Negeri 15 Pontianak, SMP Negeri 28 Pontianak, dan SMP Negeri 29 Pontianak;
 - b. Kecamatan Pontianak Timur : SMP Negeri 21 Pontianak;
 - c. Kecamatan Pontianak Tenggara: SMP Negeri 8 Pontianak;
 - d. Kecamatan Pontianak Selatan: SMP Negeri 22 Pontianak;
 - e. Kecamatan Pontianak Kota: SMP Negeri 19 Pontianak;
 - f. Kecamatan Pontianak Barat : SMP Negeri 13 Pontianak dan SMP Negeri 17 Pontianak.
7. Bagi sekolah sebagaimana tercantum pada angka 6, kuota Zona A paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah dan kuota Zona B paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
8. Kuota jalur afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
9. Kuota dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, termasuk kuota anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
10. Sekolah penyelenggara layanan inklusi sebagaimana dimaksud pada angka 9 untuk SMP di Kota Pontianak:
 - a. Kecamatan Pontianak Utara : SMP Negeri 20 Pontianak;
 - b. Kecamatan Pontianak Timur : SMP Negeri 14 Pontianak;
 - c. Kecamatan Pontianak Selatan: SMP Negeri 2 Pontianak, dan SMP Negeri 23 Pontianak;
 - d. Kecamatan Pontianak Kota: SMP Negeri 19 Pontianak;
 - e. Kecamatan Pontianak Barat : SMP Negeri 12 Pontianak dan SMP Negeri 17 Pontianak.
11. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
12. Kuota jalur prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
13. Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB SMP Negeri.

14. Dalam hal kuota jalur afirmasi dan atau kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan atau kuota jalur prestasi tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
15. Daftar kuota masing-masing jalur pendaftaran dan daya tampung SMP tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini.

C. PERSYARATAN PPDB SMP NEGERI

1. Persyaratan Umum

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) pada SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat, Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.

2. Persyaratan Jalur Zonasi

- a. fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat pada 1 Juli 2022 atau sebelumnya (bukan tanggal cetak);
- b. fotocopy ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat;
- c. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- d. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), dan kartu keluarga asli pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
- f. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Zonasi PPDB SMP Negeri

3. Persyaratan Jalur Afirmasi

- a. fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat pada 1 Juli 2022 atau sebelumnya (bukan tanggal cetak);
- b. fotocopy ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat;
- c. bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyatakan status keadaan yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu (Data DTKS Dinas Sosial);
- d. Surat rekomendasi dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak bagi calon peserta didik penyandang disabilitas;
- e. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- f. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), kartu keluarga asli dan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak atau Surat Rekomendasi dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak bagi calon peserta didik penyandang disabilitas, pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
- g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik;

- h. setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB SMP Negeri (bagi penyandang disabilitas dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan).
4. Persyaratan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
- fotocopy kartu keluarga;
 - fotocopy ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
 - surat penugasan orangtua calon peserta didik dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), kartu keluarga asli dan surat penugasan orangtua calon peserta didik pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - menunjukkan surat keterangan domisili dalam wilayah Kota Pontianak yang dikeluarkan oleh Kelurahan;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
 - setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali PPDB SMP Negeri.
5. Persyaratan Jalur Prestasi
- fotocopy kartu keluarga;
 - fotocopy ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
 - Surat Keterangan Nilai Rapor SD/ Sederajat dengan dilampirkan fotocopy rapor yang sudah dilegalisir.
 - bukti atas prestasi dari hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/ kota (jika ada).
 - pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), kartu keluarga asli dan bukti atas prestasi dari hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/ kota (jika ada) pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun (sejak 1 Juli 2020 sampai 1 Januari 2023).
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
 - setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Prestasi PPDB SMP Negeri.
6. Pengajuan pendaftaran dan *upload* berkas persyaratan PPDB sesuai jalur yang dipilih dilakukan oleh calon peserta didik secara *online* dengan memilih salah satu loket sekolah yang tersedia
7. Calon peserta didik melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran di sekolah secara *offline* sesuai dengan undangan yang diberikan melalui media *WhatsApp*, dengan membawa berkas persyaratan asli.

8. Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah tujuan.
9. Calon peserta didik yang telah mendapatkan Tanda Bukti Pendaftaran tidak dapat mengubah pilihan jalur PPDB.
10. Semua berkas persyaratan PPDB yang di *upload* menjadi milik Panitia PPDB.
11. Pelaksanaan pendaftaran PPDB SMP Negeri tidak dipungut biaya.

D. SELEKSI

1. Seleksi Jalur Zonasi
 - a. Pemeringkatan PPDB jalur zonasi diurutkan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - b. Jarak terdekat diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah pada point (a) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir
 - d. Jika ditemukan jarak dan usia yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
2. Seleksi Jalur Afirmasi
 - a. Calon peserta didik penyandang disabilitas diprioritaskan untuk dapat langsung diterima di sekolah tujuan.
 - b. Pemeringkatan PPDB jalur afirmasi diurutkan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - c. Jarak terdekat diukur dengan cara menarik garis lurus antara domisili calon peserta didik dengan sekolah tujuan.
 - d. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah pada point (c) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir
 - e. Jika ditemukan jarak dan usia yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
3. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
 - a. Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orangtua/wali berdasarkan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 - b. Pendaftaran PPDB jalur perpindahan tugas orangtua/wali pada sekolah tujuan ditutup setelah kuota pada jalur perpindahan tugas orangtua/wali pada sekolah tersebut sudah terpenuhi;
 - c. Apabila masih tersisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar.
4. Seleksi Jalur Prestasi
 - a. Pemeringkatan PPDB jalur prestasi diurutkan berdasarkan nilai akhir akumulasi dari jumlah rata-rata nilai rapor setiap semester pada 5 (lima) semester terakhir (Kelas IV semester 1 dan 2, Kelas V semester 1 dan 2, dan Kelas VI semester 1) dan bonus nilai dari pembobotan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara minimal tingkat kota;

- b. Pembobotan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

Juara I, II atau III Tingkat Internasional dan Tingkat Nasional	:	diprioritaskan untuk langsung diterima
Juara I Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 50% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara II Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 40% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara III Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 30% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara I Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 25% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara II Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 20% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara III Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 15% dari jumlah rata-rata nilai rapor

- c. Jika adanya nilai akhir yang sama pada point (a), maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir
- d. Jika ditemukan nilai akhir dan usia yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
5. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB
- Hasil Seleksi PPDB disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
 - Hasil Seleksi PPDB yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui rapat panitia beserta dewan guru.
 - Hasil Seleksi PPDB diumumkan secara online melalui website resmi PPDB pada tanggal 7 Juli 2023 mulai pukul 10.00 WIB.

E. DAFTAR ULANG

- Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada sekolah tertentu untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- Pelaksanaan daftar ulang tidak dipungut biaya.
- Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 s.d.11 Juli 2023 mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
- Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan gugur sebagai peserta didik pada sekolah yang menyatakan menerima.

F. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) DAN HARI PERTAMA MASUK SMP

- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada SMP dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 12 Juli 2023 s.d. 15 Juli 2023.
- Hari pertama masuk SMP pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.
- Mekanisme Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

III. KEPANITIAAN

A. PEMBENTUKAN KEPANITIAAN

1. Kegiatan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
2. Dalam penyelenggaraan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024 dibentuk Tim Pengendali PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024.
3. Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024 dibentuk Panitia Tingkat Kota dan Panitia Tingkat Satuan Pendidikan.
4. Tim Pengendali PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak.
5. Panitia Tingkat Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak.
6. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. TUGAS TIM PENGENDALI

1. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;
2. Menerima laporan pelaksanaan PPDB Kota Pontianak dari setiap Satuan Pendidikan peserta;
3. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
4. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB Kota Pontianak; dan
5. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Kota Pontianak tahun berikutnya

C. TUGAS PANITIA TINGKAT KOTA

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak (seperti brosur/spanduk) serta melalui *website*.
2. Menyiapkan aplikasi PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* bersama-sama pengembang aplikasi yang ditunjuk.
3. Melaksanakan sosialisasi aplikasi PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* kepada Kepala SMP Negeri.
4. Melaksanakan bimbingan dan layanan teknis aplikasi PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* kepada Operator Sekolah.

5. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat tentang PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online*
6. Melaporkan hasil penyelenggaraan PPDB pada SMP Negeri dengan mekanisme *online* kepada Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
7. Tim Pelayanan Pengaduan akan melayani pengaduan melalui E-Formulir yang disediakan dalam link pelayanan pengaduan pada laman <https://pontianak.siap-ppdb.com>

D. TUGAS PANITIA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
2. Mencetak berkas persyaratan PPDB yang di upload oleh calon peserta didik.
3. Melakukan klarifikasi dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan PPDB serta keabsahan dokumen pendaftaran;
4. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
6. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui website; dan
7. Melakukan pendaftaran ulang Peserta Didik Baru yang diterima;

IV. LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

Dalam pelaksanaan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024, Sekolah dilarang:

1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan;
2. menambah ruang kelas baru; dan/atau
3. membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang telah ditetapkan.
4. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

B. SANKSI

1. Bagi calon siswa yang terdaftar dalam proses PPDB atau diterima sekolah melalui jalur di luar jalur pendaftaran tersebut, maka calon atau siswa tersebut dikeluarkan dari daftar PPDB atau sekolah.

2. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan dikenai sanksi berupa pengeluaran dari Sekolah.
3. Bagi orang tua/wali dan atau pihak lain terkait, yang terbukti memalsukan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu/miskin dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir 1 diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak, Sekolah bersama Pemerintah Kota Pontianak wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pernyataan bersedia diproses secara hukum berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
7. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir 4 berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kegiatan PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024 diselenggarakan dengan memperhatikan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2023/2024 dalam petunjuk teknis ini merujuk pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Standar Operasional Pengelolaan Layanan Pengaduan



VI. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam juknis ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK**

SRI SUJARTI

Lampiran II :Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : 255 /KEP/TAHUN 2023

Tanggal : 17 April 2023

Tentang

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024

DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No.	Nama SMP	Daya Tampung PPDB	Kuota					
			Jalur Zonasi			Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan Tugas	Jalur Prestasi
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B			
			50%	45%	5%	20%	5%	25%
1.	SMP Negeri 01 Pontianak	285	143	143		57	14	71
2.	SMP Negeri 02 Pontianak	252	126	126		50	13	63
3.	SMP Negeri 03 Pontianak	286	143	143		57	14	72
4.	SMP Negeri 04 Pontianak	284	142	142		57	14	71
5.	SMP Negeri 05 Pontianak	220	110	110		44	11	55
6.	SMP Negeri 06 Pontianak	220	110	110		44	11	55
7.	SMP Negeri 07 Pontianak	192	96	96		38	10	48
8.	SMP Negeri 08 Pontianak	318	159	142	16	64	16	80
9.	SMP Negeri 09 Pontianak	224	112	112		45	11	56
10.	SMP Negeri 10 Pontianak	288	144	144		58	14	72
11.	SMP Negeri 11 Pontianak	224	112	112		45	11	56
12.	SMP Negeri 12 Pontianak	224	112	112		45	11	56
13.	SMP Negeri 13 Pontianak	347	174	157	17	69	17	87
14.	SMP Negeri 14 Pontianak	288	144	144		58	14	72

No.	Nama SMP	Daya Tampung PPDB	Kuota					
			Jalur Zonasi			Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan Tugas	Jalur Prestasi
			Total Jalur Zonasi	Zona A	Zona B			
			50%	45%	5%	20%	5%	25%
15.	SMP Negeri 15 Pontianak	222	111	100	11	44	11	56
16.	SMP Negeri 16 Pontianak	288	144	144		58	14	72
17.	SMP Negeri 17 Pontianak	224	112	101	11	45	11	56
18.	SMP Negeri 18 Pontianak	192	96	96		38	10	48
19.	SMP Negeri 19 Pontianak	192	96	86	10	38	10	48
20.	SMP Negeri 20 Pontianak	191	96	96		38	10	48
21.	SMP Negeri 21 Pontianak	221	111	100	11	44	11	55
22.	SMP Negeri 22 Pontianak	191	96	85	10	38	10	48
23.	SMP Negeri 23 Pontianak	256	128	128		51	13	64
24.	SMP Negeri 24 Pontianak	160	80	80		32	8	40
25.	SMP Negeri 25 Pontianak	96	48	48		19	5	24
26.	SMP Negeri 26 Pontianak	96	48	48		19	5	24
27.	SMP Negeri 28 Pontianak	64	32	29	3	13	3	16
28.	SMP Negeri 29 Pontianak	128	64	58	6	26	6	32
	JUMLAH	6.173	3.087	2.991	95	1.235	309	1.543



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

SRI SUJARTI

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : 255 /KEP/TAHUN 2023

Tanggal : 17 April 2023

Tentang

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2023/2024

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK
PENDAFTARAN PPDB SISTEM ONLINE KOTA PONTIANAK
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2023/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Peserta Didik :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat : Jalan :
Gang :
RT / RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen dan data yang saya buat, saya lampirkan dan *upload* di aplikasi PPDB *Online* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun Ajaran 2023/2024 baik melalui Jalur Zonasi / Jalur Afirmasi / Jalur Prestasi ataupun Jalur Perpindahan Orang Tua adalah benar dan sah;
2. Apabila ditemukan data yang saya buat, saya lampirkan dan yang saya *upload* di aplikasi PPDB *Online* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun Ajaran 2023/2024 baik melalui Jalur Zonasi / Jalur Afirmasi / Jalur Prestasi ataupun Jalur Perpindahan Orang Tua adalah palsu dan tidak sah, maka saya bersedia diproses secara hukum dituntut di muka pengadilan, bersedia menerima segala konsekuensi;
3. Apabila ditemukan data yang saya buat, saya lampirkan dan *upload* di aplikasi PPDB *Online* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun Ajaran 2023/2024 melalui Jalur Zonasi / Jalur Afirmasi / Jalur Prestasi ataupun Jalur Perpindahan Orang Tua adalah palsu dan tidak sah, maka saya bersedia dinyatakan gugur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sesungguhnya serta tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Pontianak, 2023
Yang membuat pernyataan
Calon Siswa

(.....)

(.....)

* harap dibawa pada saat melakukan validasi berkas



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

* PONTIANAK
SRI SUJIARTI